



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP *GOOD
GOVERNMENT GOVERNANCE* PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT (STUDI EMPIRIS
SELURUH DINAS KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

NADYA WULAN DARY

NPM 1515100226

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh system informasi akuntansi dan system pengendalian intern terhadap *Good Government Governance* Pemerintah Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan membagikan kuisisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas Kabupaten Langkat dengan jumlah sampel 54 responden yaitu Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, dan Bendahara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t, uji f dan uji determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, system informasi akuntansi dan system pengendalian intern baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance* Pemerintah Kabupaten Langkat .

Kata Kunci : **Sistem Informasi Akuntansi, system pengendalian intern, *Good Government Governance***

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the simultaneous effect of accountant informations system and internal control system toward Good Government Governance in Langkat. The data of the study were obtained by questionnaire. The populations involved in this study were all employes in the regency of Langkat. The sample populations were 54 respondents. They are Head Subdivision of Finance, Head Subdivision of General Affairs and Treasurer.. Data analysis technique was multiple regression F-test, T –test and Determination test. The result of this study showed that simultaneous and partial the accountant information system and internal control system have positive effect toward Good Government Governance in Langkat.

Keywords : accountant information system, internal control system, and Good Government Governance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Definisi Operasional Variabel	33
D. Populasi dan Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Deskripsi Objek Penelitian	43
2. Hasil Analisa Data	48
3. Deskripsi Variabel Penelitian	52
4. Uji Instrumen Penelitian	58
5. Uji Asumsi Klasik.....	60
6. Uji Analisis Regresi Berganda	64
7. Uji Hipotesis	65

	B. Pembahasan.....	68
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	71
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya.....	26
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	36
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisisioner	48
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	49
Tabel 4.3 Umur Responden.....	49
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden	49
Tabel 4.5 Masa Kerja Responden	50
Tabel 4.6 Jabatan Responden	50
Tabel 4.7 Golongan Responden.....	51
Tabel 4.8 Pengalaman Diklat Responden	51
Tabel 4.9 Penilaian Responden Variabel X_1	52
Tabel 4.10 Penilaian Responden Variabel X_2	54
Tabel 4.11 Penilaian Responden Variabel Y.....	56
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas.....	58
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas	59
Tabel 4.14 Hasil Pengujian <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	60
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	62
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	64
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (uji t).....	66
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (uji F)	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Langkat.....	47
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas	61
Gambar 4.3 Normal P-P Plot Uji Normalitas	61
Gambar 4.4 <i>Scatter Plot</i> Uji Heterokedasitas.....	63

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi & Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Government Governance* Pemerintah Kabupaten Langkat (Studi Empiris Pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membimbing, membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membimbing, membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Zaili Chaniago dan Ibunda Yusnani Sari S.Pd, serta Adikku Aura Yolanda yang telah memberikan dukungan, iringan doa setiap harinya, cinta kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat Terbaikku Pratiwi Wulan Hanif (Botsku), Anggi Pratiwi, Syahira Meyranda Putri dan Iin Yuli Syafrina yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman seangkatan terbaik di kampus Yuniati Salsalina, Linda Aulia, Suci Rahmadiantri, Icah Sofianah, Jamilah, terimakasih banyak untuk dukungannya dan perjuangan kita bersama selama masa perkuliahan ini.
9. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini memiliki kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, sangat diperlukan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 24 Februari 2020

Nadya Wulan Dary
1515100226

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan akurat kepada masyarakat dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Menurut Hardiwinoto (2017), *Good Government Governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good Government Governance* mendasarkan kepada sesuatu yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, instansi pemerintah memerlukan pengendalian intern pemerintah yang bertugas meneliti, mengawasi dan mengevaluasi suatu system informasi akuntansi pada instansi tersebut. Penerapan *Good Government Governance* sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena berperan sebagai pengendali pemerintah agar terbebas dari tindak korupsi.

Menurut Selamet (2011:256), salah satu faktor yang dapat mewujudkan *Good Government Governance* ialah diperlukan adanya Sistem Informasi Akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik dalam menyediakan informasi keuangan diperlukan adanya dukungan dari sistem informasi akuntansi agar dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 menyatakan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sistem yang menganalisis, mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola dan merealisasikan data keuangan dan data-data keuangan yang terkait menjadi suatu informasi yang disajikan kepada para pengguna dan masyarakat.

Menurut Mardjiono (2009) faktor yang juga berpengaruh dalam mewujudkan *Good Government Governance* adalah sistem pengendalian intern pemerintah terutama dalam hal pengawasan intern. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah sebuah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi yang penyusunannya berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 namun kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem informasi akuntansi dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, hal ini dapat dilihat dari kasus audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada pemerintah Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten Langkat yang dirilis pada 29 Mei 2015, mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan uang Negara yang mencapai Rp 57,6 miliar yang terdapat pada Sembilan item temuan. Pemerintah Kabupaten Langkat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2013 dan opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2014. Opini tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2014 menurun dibandingkan dengan tahun 2013, serta dugaan penyimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah masih belum optimal pelaksanaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Elbanan (2009) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal menyebabkan *Good Government Governance* yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Government Governance* Pemerintah Kabupaten Langkat (Studi Empiris Pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat) ”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Adanya dugaan penyimpangan uang Negara pada Pemerintah Kabupaten Langkat yang mencapai Rp.57,6 Miliar pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern dengan baik.
- b. Pemerintah Kabupaten Langkat masih belum optimal dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi.
- c. Pemerintah Kabupaten Langkat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2013, dan Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2014 dari hasil Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2014 menurun dibandingkan dengan tahun 2013.

2. Batasan Masalah

Selanjutnya, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, spesifik, sempurna, dan mendalam maka peneliti membatasi masalah tentang *Good Governance Government* yang diukur / dinilai berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat ?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat .

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara parsial apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui secara parsial apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat.
- c. Untuk mengetahui secara simultan apakah Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang di dapat dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replica dari penelitian Halomoan Ompusunggu Universitas Jendral Soedirman “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Kabupaten Banyumas. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Government Governance* Pemerintah Kabupaten Langkat (Studi Empiris pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_1), serta variabel terikat yaitu Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (Y), sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu Sistem Informasi Akuntansi (X_1), dan Sistem Pengendalian Intern (X_2), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu *Good Government Governance* (Y).

2. Wilayah Penelitian :

Penelitian terdahulu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sedangkan wilayah penelitian ini di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3. Waktu Penelitian :

Penelitian terdahulu di lakukan pada tahun 2002, sedangkan penelitian ini di lakukan pada tahun 2019.

4. Perbedaan variabel penelitian, wilayah penelitian, dan waktu penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi *Good Government Governance*

Menurut Hardiwinoto (2017), *Good Government Governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good Government Governance* mendasarkan kepada suatu yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Menurut artikel yang dikeluarkan DPPKA Provinsi Yogyakarta, *Good Government* ialah suatu keputusan yang menyangkut peraturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah. *Good Government* juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban dengan kata lain suatu sistem yang mengatur perusahaan.

Berdasarkan uraian mengenai *good goverment* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good goverment* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab untuk penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi dengan menggunakan seperangkat aturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah Negara dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Penerapan *Good Government* perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum, prinsip-prinsip dasar *Good Government* menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam Hardiwinoto (2017), prinsip dasar *Good Government Governance* adalah: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) dan keadilan (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh *Good Government Governance* telah diterapkan dalam instansi. Namun apabila diperdalam kembali, maka prinsip dari *Good Government Governance* terdiri dari 9 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Transaparansi (*Transparency*)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan pasar modal di Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko secara prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan perusahaan sehingga mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melaksanakan transaksi dengan perusahaan sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Meningkatkan keterbukaan

informasi dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu serta benar dan dapat diandalkan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksana anggaran tersebut. Akuntabilitas dapat dicapai dengan baik melalui pengawasan yang efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara komisaris, direksi dan auditor termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara direksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan dan komisaris sebagai wakil pemegang saham yang bertugas mengawasi direksi. Satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas adalah:

- 1) Praktek audit internal yang efektif
- 2) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan.

c. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Pemerintah bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Tanggung jawab atau *responsible* merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tanggungjawab pemerintah adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan pemerintah terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar pengajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak luar kegiatan perusahaan negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

d. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh *asset* perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga perlindungan terwujud secara jujur dan adil. Juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan serta keadilan juga harus dirasakan oleh para karyawan dan masyarakat lingkungannya. *Fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif, yaitu adanya peraturan

perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif. *Good Government Governance* pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial belaka. Ada beberapa elemen yang perlu dikembangkan oleh perusahaan supaya penerapan *Good Government Governance* dapat berjalan efektif. Elemen-elemen penting *Good Government Governance* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan terhadap penyelewengan finansial dan hukum, serta untuk mengidentifikasi dan menangani resiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan secara etis, efektif, dan efisien, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem pengendalian internal yang dirancang secara komprehensif dan diimplementasikan secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan mengurangi resiko kekeliruan material dalam laporan keuangan.

2) Sistem Audit

Sistem audit dan peran audit internal atau dikenal sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) amat penting bagi perusahaan. Standar praktek internasional sistem audit yang dikembangkan dan

direkomendasikan oleh organisasi *The Institute of Internal Auditors* (IAA) sangat menekankan arti penting audit internal.

3) Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan sasarannya.

4) Pelaporan perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan dengan penuh integritas. Direksi hendaknya merumuskan mekanisme yang dapat memastikan adanya kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

e. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu lembaga dalam rangka menyalurkan aspirasinya sangatlah penting. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut.

f. Tegaknya Supermasi Hukum

Indonesia merupakan Negara yang berbasis hukum, dimana terdapat banyak sekali aturan-aturan yang disahkan oleh Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan tersebut diatur

oleh pemerintah dalam rangka menjalankan suatu pemerintah yang nantinya akan menjadi pengendali atas semua kegiatan yang dijalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pemerintah diharuskan untuk mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Negara guna menghindari kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang akan terjadi apabila tidak mentaati aturan yang berlaku.

g. Perduli Kepada Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu lembaga pemerintahan harus dapat melayani semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan disuatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat yang nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut.

h. Berorientasi Terhadap Konsesus

Tata pemerintahan yang baik harus dapat mengetahui bahwa kepentingan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda demi terbangunnya suatu konsesus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus berorientasi atas kepentingan masyarakat.

i. Efektif dan Efisien

Proses-proses pemerintah dan lembaga-lembaga harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan sumber daya

publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

3. Manfaat *Good Government Governance*

Penerapan *good government governance* dalam pemerintah daerah, ada beberapa manfaat atau dampak yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Menurut Hardiwinoto (2017), adapun manfaat yang dapat diterima oleh pemerintah daerah antara lain :

- a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan
Dengan adanya prinsip *good government governance* pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai pemerintah pada setiap bidang berusaha untuk memberikan seluruh kemampuannya dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Setiap pegawai pemerintahan yang memberikan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah mereka, akan bersikap adil dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.
- b. Meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat
Dengan adanya prinsip *good government governance*, kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat. Kepercayaan publik yang dimaksud adalah masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah transparan dan memberikan pembinaan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengapresiasi kinerja pemerintah yang transparan tersebut.
- c. Menjaga keberlangsungan pemerintah daerah
Menurut Hardiwinoto (2017) mengatakan bahwa dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, serta bertanggungjawab maka kelangsungan pemerintah dapat terjamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa maupun pihak tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka dapat menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam wibawa pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.
- d. Untuk mengukur target dan kinerja pemerintah daerah
Menurut Hardiwinoto (2017) mengatakan bahwa dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat lebih diukur dibandingkan apabila pemerintah tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *good*

government governance. Dalam hal ini pemerintahan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

4. Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Banyak para ahli dalam bidang akuntansi yang memberikan definisi mengenai sistem informasi akuntansi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Mulyadi (2016:4), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Menurut Susanto (2017:38), informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1), Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi.

Pada sistem akuntansi pemerintah, ada bagian terpenting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya adalah sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintah daerah lebih dikenal dengan nama system informasi keuangan daerah (SIKD).

Menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, SIKD merupakan system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

a. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3) terdapat lima unsur pokok di dalam sistem akuntansi :

1) Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering juga disebut media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dalam sistem akuntansi secara manual, media yang digunakan untuk merekam pertama kali data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas. Sedangkan dalam sistem akuntansi dengan computer, digunakan berbagai macam media untuk memasukkan data ke dalam system pengolahan data seperti : *keyboard, optical and magnetic characters and code, mice, voice, touch sensor, dan cats.*

2) Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasanya berupa jumlah rupiah transaksi tertentu. Kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lainnya.

3) Buku Besar

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

4) Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu di buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain sesudah data akuntansi diringkas dan di golongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi. Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang debitur.

5) Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan lainnya. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer.

Menurut Susanto (2017:207) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Unsur-unsur tersebut adalah :

1) *Hardware*

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Bagian-bagian *hardware* terdiri atas :

a) Bagian *input (Input Device)*

Peralatan *input* merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam computer. Ada beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data, seperti untuk memasukkan data berbentuk teks atau berbentuk gambar, suara, video dan penunjuk. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja kalau ada *hardware* dan *software* yang bentuknya terpisah dalam *motherboard*.

b) Bagian Pengolah Utama dan Memori

Central Processing Unit (CPU) yang selama ini mungkin dikenal oleh anda adalah berbentuk kotak segi empat. Didalam CPU itu terdapat beberapa komponen-komponen lainnya seperti *processor* (CPU sesungguhnya), *memory*, *motherboard*, *hardisk*, *floppy disk*, *CD ROM*, *expansion slots*, *devices controller*, komponen lainnya dan *powersupply*.

c) Bagian *output (Output Device)*

Peralatan *output* merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan *output* yang bisa digunakan seperti *printer*, layar *monitor*, *head mount display*, LCD, *speaker* dan lain-lain.

d) Bagian komunikasi

Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa diantaranya adalah *Network Card* untuk LAN dan *Wireless LAN*, *HUB/Switching* dan *access point wireless LAN*, *Fiber Optik* dan *Router* dan *Range Extender*, *Modem (Internal, External)*, dan *wireless cardbus adapter*, Pemancar dan penerima, *very small aperture satelit* dan *satelit*.

2) *Software*

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Pengelompokan *software* meliputi :

a. *Operating System* (sistem operasi)

Operating System (Sistem operasi) berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer misalnya antara *keyboard* dengan CPU, dengan layar monitor dan lain-lain. Contoh *Microsoft Windows*, *Windows XP*, dll.

b. *Interpreter* dan *Compiler*

1) *Interpreter*

Interpreter merupakan *software* yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia kedalam bahasa yang dimengerti oleh computer (bahasa mesin) perintah per perintah. Di masyarakat, interpreter ini lebih dikenal sebagai bahasa. Contoh Microsoft Access, oracle, vixual fox pro, dll.

2) *Compiler*

Compiler berfungsi untuk menterjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia kedalam bahasa yang dipahami oleh computer secara langsung satu file.

c. Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut sebagai ‘paket aplikasi’ merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan. *Software* ini dibuat oleh perusahaan perangkat lunak tertentu (*Software house*) baik dari dalam maupun luar negeri yang umumnya berada di Amerika.

3) *Brainware*

Brainware yang dimaksud adalah Sumber daya manusia sistem informasi dan organisasi. Sumber daya manusia sistem informasi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Beberapa kelompok sumber daya manusia suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas diatas secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam pemilik sistem informasi dan pemakai sistem informasi.

4) Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur merupakan komponen sistem informasi baik itu sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur yang benar sistem informasi sehebat apapun tidak akan berjalan dengan baik. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Jika prosedur telah diterima oleh pemakai sistem informasi maka prosedur akan menjadi pedoman bagaimana fungsi sistem informasi tersebut harus dioperasikan. Dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk karena itu aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Aktivitas dibidang sistem informasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung perusahaan agar bisa berjalan dengan baik. Suatu sistem informasi tidak dapat dikembangkan tanpa memahami

terlebih dahulu aktivitas-aktivitas bisnis yang selama ini berjalan disuatu perusahaan.

5) *Database*

Database merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pemakai, yang tersimpan didalam media penyimpanan di suatu perusahaan. *Database* yang digunakan harus sesuai dengan prosedur yang sesuai. Sistem *database* merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan.

a. Media dan Sistem Penyimpanan Data

Media dan sistem penyimpanan data terdiri dari dua, yaitu pertama, media penyimpanan untuk menyimpan data secara berurutan (*sequential*). Melalui media ini record-record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan. Sebagai contoh adalah pita *magnetic (Magnetic tape)*. Kedua, media penyimpanan secara langsung (*direct*) atau acak (*random*) yang memungkinkan pemakai (*user*) untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Sebagai contoh adalah *magnetic disk* seperti *floppy disk, hardisk, compact disk (CD)*, dan teknologi paling baru adalah *digital video disk (DVD)*.

b. Sistem Pengolahan

Ada dua cara sistem pengolahan data yaitu Pengolahan data secara *batch* (mengumpulkan terlebih dahulu) dan Pengolahan secara *On-line*.

c. Organisasi *Database*

Organisasi *Database* terbagi menjadi dua yaitu organisasi data pada *database* tradisional dan organisasi *database modern*.

d. Model-model data

Secara umum model data terbagi menjadi beberapa model yaitu model hirarki, model *network*, dan model relasi.

6) Jaringan komputer dan telekomunikasi

Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi terbagi tiga yaitu fungsi sistem telekomunikasi, pemroses komunikasi, dan *software* komunikasi.

b. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun pihak internal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga

dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

Menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional.

Diana dan Setiawati (2011:5), menyatakan tujuan suatu sistem informasi akuntansi :

- 1) Mengamankan harta/kekayaan perusahaan. Harta/kekayaan di sini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan.
- 2) Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan.
- 3) Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal
- 4) Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.
- 5) Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan). Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit. Audit Audit semacam ini berguna bagi perusahaan untuk evaluasi diri, serta untuk menimbulkan kewaspadaan (kehati-hatian) pada karyawan administrasi bahwa apa yang mereka kerjakan suatu saat akan diperiksa oleh pihak lain.
- 6) Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran kas. Sistem informasi dapat dirancang untuk mempermudah pengawasan pengeluaran, apakah sudah melewati batas anggaran yang telah disetujui.
- 7) Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selain berguna untuk membandingkan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan biaya standar dengan kenyataan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, data historis yang diproses oleh sistem informasi dapat digunakan untuk meramal pertumbuhan penjualan dan aliran kas atau untuk mengetahui tren jangka panjang beserta korelasinya.

5. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak donor maupun masyarakat. Menurut Mulyadi (2016:163), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut *The American Institute Of Certified Public Accountant* (AICPA) sebagaimana dikutip oleh Mardi (2011:59) mendefinisikan pengertian pengendalian intern ialah rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang diterapkan untuk melindungi harta miliknya, sebagai kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi pengertian mengenai Sistem Pengendalian Internal tersebut maka disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral dalam bentuk rencana organisasi, metode serta prosedur untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan. Sebagai upaya untuk melindungi aktiva, sumber daya ekonomi dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

- a. Lingkungan pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika.
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi.
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif.
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- b. Penilaian risiko
Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas Identifikasi risiko, dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan :
 - 1) Tujuan Instansi Pemerintah
Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan instansi pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi serta rencana penilaian resiko.
 - 2) Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah.
 - b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
 - c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah.
 - d) Mengandung unsur kriteria pengukuran.
 - e) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup.
 - f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- 4) Pengendalian fisik atas asset.
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- 6) Pemisahan fungsi.
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- 11) Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Penyelenggara kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- 5) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam waktu dan bentuk yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern, pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui :

- 1) Pemantauan berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Evaluasi terpisah
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilai sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah

dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah

- 3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Di kutip dari Buku II IHPS Tahun 2014 yang diterbitkan BPK RI

Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu :

- 1) Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- 2) Kelemahan Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 3) Kelemahan struktur pengendalian intern.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari peneliti ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan sebelumnya yaitu :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel X dan Y	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Resti Ardhanareswari 2017	Pelaksanaan dan Pengungkapan <i>Good Government Governance</i> Pada Bank Umum Syariah	X= Pelaksanaan Y= Pengungkapan <i>Good Government Governance</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>Good Government Governance</i> BRI Syariah

					dan pengungkapan nya telah melaksanakan <i>Good Government Governance</i> dengan “BAIK” meski ada beberapa item/indikator pengungkapan yang tidak dimasukkan dalam laporan tata kelola perusahaan/ <i>Good Government Governance</i> .
2.	Misya Kurnia Lahu 2011	Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan <i>Good Government Governance</i> Pada PT.Kimia Farma (Persero) TBK Jakarta	X= Peranan Audit Internal Y= Penerapan <i>Good Government Governance</i>	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>Good Government Governance</i> pada PT Kimia Farma Tbk. Ini bisa dilihat dari pengujian parsial dengan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,591 dengan taraf signifikan sebesar 0,014.
3.	Setyadi Irfan 2013	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Penerapan <i>Good Government Governance</i>	X = Kinerja Keuangan Y = Penerapan <i>Good Government Governance</i>	Deskriptif Asosiatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan <i>Return On Asset, Return on Equity</i> dan <i>Net Profit Margin</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Good Government</i>

					<i>Governance.</i>
4.	Nurdiana (2012)	Pengaruh leverage, profitabilitas, dan firm size terhadap GCG (Studi kasus terhadap 3 bank yang terdaftar pada <i>Corporate Governance Perception Index CGPI</i>)	X=Leverage, profitabilitas, dan firm size Y= <i>Good Governance</i>	Deskriptif Asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji regresi persial terhadap persamaan regresi bahwa leverage dan firm size tidak mempunyai pengaruh terhadap GCG sedangkan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap GCG.
5.	Ivan Setiawan (2012)	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap implementasi <i>Good Government Governance</i>	X=Karakteristik Perusahaan Y=Implementasi <i>Good Government Governance</i>	Asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi GCG sedangkan profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

Sumber : Penulis, 2019

C. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2013:128), kerangka konseptual merupakan dasar teori yang menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel variabel penelitian tentang bagaimana peraturan-peraturan teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *good goverment governance*. Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X_2). Sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu *Good Government Governance* (Y) . Pada uraian atau teori-teori dari latar belakang masalah diatas maka berikut kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan yaitu :

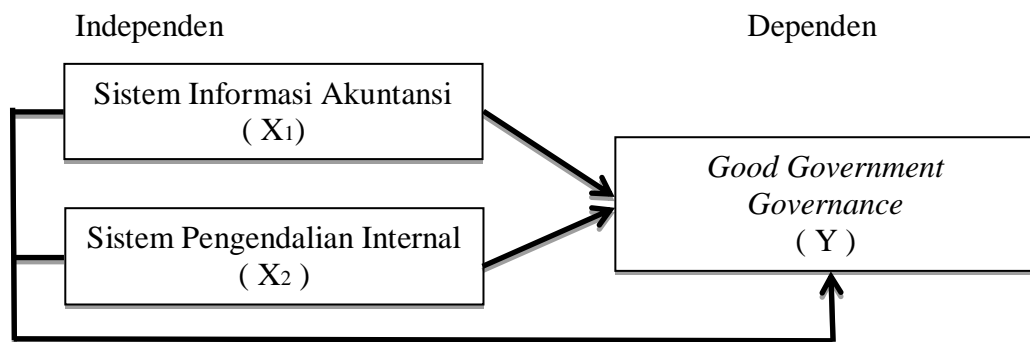
1. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance*

Menurut Selamat (2011), salah satu factor yang dapat mewujudkan *Good Government Governance* ialah diperlukan adanya penerapan yang lebih maksimal terhadap sistem informasi akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan transparan dan akuntabel. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku agar terwujudnya prinsip-prinsip *Good Government Governance*.

2. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Government Governance*

Menurut Mardjiono (2009) factor yang juga berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance* adalah system pengendalian intern pemerintah terutama dalam hal pengawasan intern. Pengendalian intern berguna untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas informasi keuangan. Menurut Sukmaningrum (2012) mengemukakan bahwa, sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas, dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good*

governance intern dan garis pertama dalam melawan ketidak absahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD, sehingga pengendalian intern pemerintah berhubungan dengan *good governance*. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah sebuah system yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberhasilan penerapan *Good Government Governance* juga tidak terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal control dalam sebuah organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:132), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis dapat membuat hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem informasi Akuntansi (SIA) secara parsial terhadap *Good Government Governance* pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat .
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara parsial terhadap *Good Government Governance* pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat .
3. Terdapat pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan terhadap *Good Government Governance* pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat .

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:21), Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai 2019 sampai dengan selesai. Tabel skedul proses penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	2019															
		Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov									
1	Pengajuan Judul	■															
2	Kunjungan Ke Perusahaan	■	■														
3	Pembuatan Proposal		■	■													
4	Bimbingan Proposal			■	■												
5	Seminar Proposal					■											
6	Riset						■	■	■	■							
7	Analisis Data										■	■					
8	Bimbingan Skripsi												■	■			
9	Sidang Meja Hijau																

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu :

- a. Menurut Sugiyono (2016), Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu adalah system informasi akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal (X_2).
- b. Menurut Sugiyono (2016), Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* (Y) .

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan serta bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel dari suatu factor lainnya. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep dan teori serta definisi atau gabungan keduanya yang ada di lapangan. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah :

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1.	Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya personalia/ pelaksana peralatan 2. Tugas 3. Tujuan (Silviana, 2013) 	Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya, seperti, manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. (Menurut Bodnar & Hopwood (2013)	Likert
2.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X ₂)	<p>Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern (PP Nomor 60 tahun 2008)	Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)	Likert
3.	<i>Good Government Governance</i> (Y)	<p>Prinsip-prinsip <i>Good Government Governance</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Kewajaran (Hardiwinoto, 2017)	<i>Good Government Governance</i> dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan <i>stakeholder</i> lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. (Menurut Suprayitno., et al. (2009) IICG	Likert

Sumber : Penulis, 2019

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Kabupaten Langkat.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016), Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang diambil sebagai sumber data untuk mewakili seluruh populasi. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah :

- a) Para pegawai yang melaksanakan bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada Dinas Kabupaten Langkat.
- b) Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan Bendahara pada Dinas Kabupaten Langkat sehingga tiap Dinas ditetapkan secara *purposive sampling* sebanyak 3 orang yang menjadi responden.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staff bagian keuangan atau akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan Dinas dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Tabel Populasi dan Sampel dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Populasi Dan Sampel Penelitian Seluruh Dinas Pemerintah Kabupaten Langkat

No	Nama Dinas	No	Nama Dinas
1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 3 orang	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 3 orang
2	Dinas Pendidikan 3 orang	12	Dinas Perhubungan 3 orang
3	Dinas Kesehatan 3 orang	13	Dinas Kearsipan & Perpustakaan 3 orang
4	Dinas Koperasi 3 orang	14	Dinas Perdagangan & Perindustrian 3 orang
5	Dinas Ketenagakerjaan 3 orang	15	Dinas Kelautan & Perikanan 3 orang
6	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 3 orang	16	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman 3 orang
7	Dinas Komunikasi & Informatika 3 orang	17	Dinas Sosial 3 orang
8	Dinas Pemuda & Olahraga 3 orang	18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3 orang
9	Dinas Lingkungan Hidup 3 orang	19	Dinas Parawisata & Kebudayaan 3 orang
10	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan, & Perlindungan Anak 3 orang		

Sumber: <https://www.langkatkab.go.id>

E. Jenis dan Sumber data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui pemberian angket atau kuisisioner kepada Kasubag Keuangan, Bendahara dan Kasubag Umum pada Dinas di Kabupaten Langkat. Pengumpulan data akan diperoleh dari angket atau kuisisioner kepada karyawan dan melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket (kuisisioner). Menurut Sugiyono (2016) Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data dimana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2016), skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Skala likert terdiri 5 (lima) angka yakni mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Perinciannya adalah:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

G. Teknik Analisis Data

Untuk mendeskripsikan hasil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan dalam mengelolah data penelitian dilakukan beberapa pengujian seperti uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta menggunakan program pengolahan data statistik yaitu program SPSS Versi 16.

1. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) “ uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”. Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur maupun mengukur apa yang diukur.

Menurut Ghozali (2013) “Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , dengan membandingkan nilai r_{hitung} dari hasil output (*Corrected Item Total Correlation*) dengan r_{tabel} . Total correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilainya positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x^2)(\sum y^2)}{\sqrt{\{\sum x^2 - (\sum x)(\sum y^2 - (\sum y)\}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien Korelasi

$\sum x$ = Skor Variabel Independen

$\sum y$ = Skor Variabel Dependen

$\sum x^2$ = Kuadrat dari Skor Variabel Independen

$\sum y^2$ = Kuadrat dari Skor Variabel Dependen

$\sum xy$ = Hasil Perkalian dari Skor Jumlah Variabel X dan Variabel Y

n = Jumlah Responden

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) “Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika $\alpha > 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika $\alpha < 0,60$.

2. Uji Asumsi Data/Asumsi Klasik

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu :

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013), “Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013), “Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Asumsi multikolinieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghozali (2013), “Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu (1) nilai Tolerance dan (2) VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika, nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas dan jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas”.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013),”Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, maka model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*). Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji statistik regresi linier berganda, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	: <i>Good Government Governance</i>
a	: Konstanta
b ₁	: Koefisien Regresi Variabel Sistem Informasi Akuntansi
X ₁	: Sistem Informasi Akuntansi
b ₂	: Koefisien Regresi Variabel Sistem Pengendalian Intern
e	: Error

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013) “menyatakan Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui *adjusted*. *Adjusted* ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh > 0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Semakin besar angka *Adjusted* maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika *Adjusted* semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen (Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem

Pengendalian Intern) terhadap variabel dependen (*Good Government Governance*) yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi .

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali (2013) “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

- 1) Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada α 0.05, maka H_0 ditolak, dan
- 2) Jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada α 0.05, maka H_0 diterima.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan F-test. Menurut Ghozali (2013) “Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat”. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan ketentuan:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0.05, maka H_1 ditolak, dan
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada σ 0.05, maka H_1 diterima

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Dinas Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. Teuku Amir Hamzah, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejarah singkat Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Pematang Jaya. Nama Langkat di ambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil yaitu Tanjung Pura.

Jarak rata-rata dari Kota Medan sekitar 45 km kearah barat laut. Luas wilayah Kabupaten Langkat 6.263 km² atau 626.329 Ha, terdiri dari 23 kecamatan yang terbagi atas 240 desa dan 37 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3^o 14' 00" - 4^o 13' 00" Lintang Utara, 97^o 52' 00" - 98^o 45' 00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Langkat di Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Deli Serdang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada masa pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Pangkalan Susu dengan Residenya Morry Agesten yang mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bid

orang-orang asing, sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat.

Dibawah pemerintahan Kesultanan dan Asisten Residen struktur pemerintahan disebut Luhak dan dibawah luhak disebut kejuruan (Raja Kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja Kecil Karo) yang berada di desa. Pemerintahan Luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala distrik, dan untuk jabatan Kepala Kejuruan atau Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pada awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun system pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan saja Keresidenan berubah menjadi SYUCO, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyucokan kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M. Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Langkat dijabat oleh :

- a. T.Ismail Ashwin 1967 – 1974
- b. HM.Iscad Idris 1974 – 1979
- c. R.Mulyadi 1979 – 1984

- d. H.Marzuki Erman 1984 – 1989
- e. H.Zulfirman Siregar 1989 – 1994
- f. Drs.H.Zulkifli Harahap 1994 – 1998
- g. H.Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999
- h. H.Syamsul Arifin, SE 1999 – 2009
- i. Ngogesa Sitepu 2009 – 2019
- j. Terbit Rencana Perangin-Angin 2019 – 2024

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14% pada periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km². Sedangkan tahun 1990 sebesar 1,07%. Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 83.223 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan kecamatan yang padat penduduknya dengan penduduknya dengan kepadatan 918 jiwa per km² dan Kecamatan Batang Serangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 42 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 201 jumlah penduduk laki-laki sebesar 521.484 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 521.039 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09%. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Melayu

(70,87%), diikuti dengan suku Jawa (9,93%), Karo (7,22%), Tapanuli/Toba (2%), Madina (2%) dan lainnya (5,94%). Sedangkan agama yang dianut Kabupaten Langkat mayoritas agama islam (90,00%), Kristen (7,56%), Katolik (1,06%), Budha (0,95%) dan lainnya (0,34%).

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Langkat :

Visi : Menjadikan langkat yang maju, sejahtera dan religius, melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Misi :

1. Penguatan ideologi bangsa dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama, suku dan golongan.
2. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi penyelenggara sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih serta perluasan partisipasi publik.
3. Pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan standar pelayanan minimal serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.
5. Pembangunan jalan kabupaten secara merata diseluruh wilayah kabupaten langkat dan infrastruktur lainnya.
6. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam berbasis penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.



Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Langkat

Sumber: <https://www.langkatkab.go.id>

Makna Lambang Kabupaten Langkat :

- 1) Sebuah bintang berwarna emas dan kuning gading melambangkan dasar falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila
- 2) Perisai berwarna kuning gading dan dua buah bambu kuning melambangkan perjuangan rakyat Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pancasila.
- 3) Untaian padi dan kapas (17 dan 8) melambangkan tanggal 17 agustus 1945 dan keseluruhannya melambnagkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.
- 4) Tapak sirih warna coklat muda dan perhiasannya melambangkan kebudayaan dan adat istiadat rakyat Kabupaten Langkat.
- 5) Sampan nelayan dengan layar warna coklat muda dan badannya warna hitam melambangkan bahwa daerah Langkat berpantai luas rakyat bersemangat bahari
- 6) Keris berwarna putih dan ganggangnya berwarna coklat tua melambangkan semangat patriotism rakyat Langkat.
- 7) Pita berwarna merah dan tulisan “Kabupaten Langkat” berwarna putih melambangkan Daerah Kabupaten Langkat.

2. Hasil Analisa Data

a. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden penelitian ini adalah pegawai pada Dinas di Kabupaten Langkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari kuisioner yang dibagikan kepada responden berjumlah 57 responden pada Dinas di Kabupaten Langkat. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 14 September – 14 Oktober 2019.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 19 Dinas di Kabupaten Langkat sebagai sampel penelitian. Seluruh kuisioner berjumlah 57 yang di bagikan kepada responden. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian. Pada tabel 4.1 diuraikan mengenai tingkat pengembalian kuisioner.

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner

No	Dinas	Sebar	Kembali		Tidak Kembali	Total
			Baik	Rusak		
1	Seluruh Dinas	57	42	0	15	42

Sumber : Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, masa kerja, jabatan, golongan, dan pengalaman diklat.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	23	54,8
2	Perempuan	19	45,2
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat dilihat bahwa ada 23 responden berjenis kelamin laki-laki atau 54,8%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan adalah 19 responden atau 45,2%.

Tabel 4.3 Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-29 Tahun	2	4,8
2	30-39 Tahun	12	28,6
3	40-49 Tahun	20	47,6
4	50-59 Tahun	8	19,0
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan umur responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan umur 40-49 Tahun yaitu 20 responden atau 47,6%, umur 30-39 tahun yaitu 12 responden atau 28,6%, umur 50-59 Tahun yaitu 8 responden atau 19,0%, dan responden yang terkecil dengan umur 20-29 Tahun yaitu 2 responden atau 4,8%.

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA	2	4,8
2	SMK	2	4,8
3	Diploma	1	2,4
4	S1	35	83,3
5	S2	2	4,8
6	S3	0	0
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden

dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu 35 responden atau 83,3%, dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) yaitu 2 responden atau 4,8%, pendidikan terakhir SMA yaitu 2 responden atau 4,8%, pendidikan terakhir SMK yaitu 2 responden atau 4,8%, dan pendidikan terakhir Diploma yaitu 1 responden atau 2,4%.

Tabel 4.5 Masa Kerja Responden

No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	>5 Tahun	4	9,5
2	5 s/d 10 Tahun	7	16,7
3	>10 Tahun	31	73,8
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan masa kerja responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu 31 responden atau 73,8%, dengan masa kerja 5 s/d 10 Tahun yaitu 7 responden atau 16,7%, dan masa kerja lebih dari 5 Tahun yaitu 4 responden atau 9,5%.

Tabel 4.6 Jabatan Responden

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kasubag Umum	13	31,0
2	Kasubag Keuangan	11	26,2
3	Bendahara	8	19,0
4	Lainnya	10	23,8
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jabatan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jabatan Kasubag Umum yaitu 13 responden atau 31,0%, jabatan Kasubag Keuangan yaitu

11 responden atau 26,2%, jabatan Bendahara yaitu 8 responden atau 19,0%, dan Lainnya yaitu 10 responden atau 23,8%.

Tabel 4.7 Golongan Responden

No	Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Golongan IV	2	4,8
2	Golongan III	36	85,7
3	Golongan II	2	4,8
4	Lainnya	2	4,8
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan golongan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan golongan III yaitu 36 responden atau 85,7%, golongan IV yaitu 2 responden atau 4,8%, golongan II yaitu 2 responden atau 4,8%, dan lainnya yaitu 2 responden atau 4,8%.

Tabel 4.8 Pengalaman Diklat Responden

No	Pengalaman Diklat	Frekuensi	Persentase (%)
1	0 s/d 5 Kali	21	50,0
2	5 s/d 10 Kali	19	45,2
3	>10 Kali	2	4,8
4	Lainnya	2	4,8
	Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan pengalaman diklat responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan pengalaman diklat 0 s/d 5 Kali yaitu 21 responden atau 50,0%, pengalaman diklat 5 s/d 10 Kali yaitu 19 responden atau 45,2%, dan pengalaman diklat lebih dari 10 kali yaitu 2 responden atau 4,8%.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 buah variabel yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern, dan memiliki satu variabel terikat yaitu *Good Government Governance*. Dalam penyebaran kuisisioner, masing-masing variabel memiliki 7 butir pernyataan yang akan diisi oleh 42 responden. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert.

Berikut adalah frekuensi hasil pengambilan data dari setiap pernyataan yang ada pada setiap variabel :

a. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X_1)

Tabel 4.9 Penilaian Responden Terhadap Variabel X_1

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	6	14,3	33	78,6	3	7,1	0	0	0	0	42	100
P2	9	21,4	30	71,4	2	4,8	1	2,4	0	0	42	100
P3	15	35,7	24	57,1	3	7,1	0	0	0	0	42	100
P4	14	33,3	22	52,4	5	11,9	1	2,4	0	0	42	100
P5	15	35,7	23	54,8	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P6	15	35,7	25	59,5	2	4,8	0	0	0	0	42	100
P7	18	42,9	21	50,0	3	7,1	0	0	0	0	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dari 42 responden sebanyak 6 responden (14,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 33 responden (78,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan.
- 2) Dari 42 responden sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 30 responden (71,4%) menyatakan

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 2, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 2.

- 3) Dari 42 responden sebanyak 15 responden (35,7%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 24 responden (57,1%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, dan sebanyak 3 responden (7,1%) menyatakan netral pada pernyataan 3.
- 4) Dari 42 responden sebanyak 14 responden (33,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 22 responden (52,4%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 4, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4.
- 5) Dari 42 responden sebanyak 15 responden (35,7%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (54,8%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 5.
- 6) Dari 42 responden sebanyak 15 responden (35,7%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 25 responden (59,5%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 6.
- 7) Dari 42 responden sebanyak 18 responden (42,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 7, sebanyak 21 responden (50,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 7, dan sebanyak 3 responden (7,1%) menyatakan netral pada pernyataan 7.

b. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X₂)Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Variabel X₂

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	8	19,0	30	71,4	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P2	9	21,4	28	66,7	5	11,9	0	0	0	0	42	100
P3	8	19,0	30	71,4	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P4	7	16,7	31	73,8	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P5	5	11,9	27	64,3	10	23,8	0	0	0	0	42	100
P6	10	23,8	28	66,7	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P7	9	21,4	28	66,7	5	11,9	0	0	0	0	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dari 42 responden sebanyak 8 responden (19,0%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 30 responden (71,4%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 1.
- 2) Dari 42 responden sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 28 responden (66,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, dan sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 2.
- 3) Dari 42 responden sebanyak 8 responden (19,0%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 30 responden (71,4%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 3.
- 4) Dari 42 responden sebanyak 7 responden (16,7%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 31 responden (73,8%) menyatakan

setuju pada pernyataan 4, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 4.

- 5) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 27 responden (64,3%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 10 responden (23,8%) menyatakan netral pada pernyataan 5.
- 6) Dari 42 responden sebanyak 10 responden (23,8%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 28 responden (66,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 6.
- 7) Dari 42 responden sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 7, sebanyak 28 responden (66,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 7, dan sebanyak 5 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 7.

c. Variabel *Good Government Governance* (Y)

Tabel 4.11 Penilaian Responden Terhadap Variabel Y

Pernyataan	Setuju		Sangat Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	13	31,0	25	59,5	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P2	9	21,4	29	69,0	4	9,5	0	0	0	0	42	100
P3	14	33,3	21	50,0	7	16,7	0	0	0	0	42	100
P4	12	28,6	22	52,4	7	16,7	1	2,4	0	0	42	100
P5	8	19,0	31	73,8	2	4,8	1	2,4	0	0	42	100
P6	9	21,4	25	59,5	7	16,7	0	0	0	0	42	100
P7	13	31,0	24	57,1	3	7,1	2	4,8	0	0	42	100

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dari 42 responden sebanyak 13 responden (31,0%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 25 responden (59,5%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 1.
- 2) Dari 42 responden sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 29 responden (69,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 2.
- 3) Dari 42 responden sebanyak 14 responden (33,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 21 responden (50,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, dan sebanyak 7 responden (16,7%) menyatakan netral pada pernyataan 3.
- 4) Dari 42 responden sebanyak 12 responden (28,6%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 22 responden (52,4%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 7 responden (16,7%) menyatakan netral pada pernyataan 4, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4.
- 5) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 27 responden (64,3%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 10 responden (23,8%) menyatakan netral pada pernyataan 5.
- 6) Dari 42 responden sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 25 responden (59,5%) menyatakan

setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 7 responden (16,7%) menyatakan netral pada pernyataan 6.

- 7) Dari 42 responden sebanyak 13 responden (31,0%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 7, sebanyak 24 responden (57,1%) menyatakan setuju pada pernyataan 7, sebanyak 3 responden (7,1%) menyatakan netral pada pernyataan 7, dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 7.

4. Uji Instrumen Penelitian

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir pernyataan kuisioner yang telah diberikan kepada responden, maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar $> 0,304$ maka butir pernyataan dianggap valid.

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Sistem Informasi Akuntansi (X1)	Butir 1	0,356	0,304	Valid
	Butir 2	0,620	0,304	Valid
	Butir 3	0,454	0,304	Valid
	Butir 4	0,649	0,304	Valid
	Butir 5	0,613	0,304	Valid
	Butir 6	0,451	0,304	Valid
	Butir 7	0,565	0,304	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X2)	Butir 1	0,679	0,304	Valid
	Butir 2	0,646	0,304	Valid
	Butir 3	0,636	0,304	Valid
	Butir 4	0,583	0,304	Valid
	Butir 5	0,406	0,304	Valid
	Butir 6	0,400	0,304	Valid
	Butir 7	0,568	0,304	Valid
<i>Good Government</i>	Butir 1	0,527	0,304	Valid
	Butir 2	0,698	0,304	Valid

<i>Governance</i> (Y)	Butir 3	0,782	0,304	Valid
	Butir 4	0,785	0,304	Valid
	Butir 5	0,650	0,304	Valid
	Butir 6	0,674	0,304	Valid
	Butir 7	0,576	0,304	Valid

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, pada tabel 4.12 maka dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X_1 , X_2 dan Y dikatakan valid. Hal ini dapat dinilai dari r-hitung masing-masing butir pernyataan lebih besar daripada nilai r-tabel.

b. Pengujian Reliabilitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir pernyataan yang diberikan kepada responden, maka perlu dilakukan uji reliabilitas. Butir pernyataan dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban responden adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuisisioner *reliable* atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Kuisisioner dikatakan *reliable* jika *alpha cronbach* $> 0,60$ dan tidak *reliable* jika sama dengan atau dibawah $0,60$.

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
Sistem Informasi Akuntansi (X_1)	0,588	<i>Reliable /</i> Konsisten
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	0,628	<i>Reliable /</i> Konsisten
<i>Good Government Governance</i> (Y)	0,793	<i>Reliable /</i> Konsisten

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13 maka dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X₁, X₂ dan Y dikatakan *reliable*, handal atau konsisten. Hal ini dapat dinilai dari *cronbach's alpha* masing-masing butir pernyataan pada tiap variable lebih besar daripada 0,60.

5. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi linear berganda layak atau tidak untuk digunakan. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi maka alat uji statistik regresi linear berganda dapat digunakan.

a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati data normal. Pengujian normalitas data dilakukan berdasarkan uji statistik non parametric *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), dasar pengambilan keputusan untuk *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) yaitu jika nilai Signifikansi $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal dan sebaliknya.

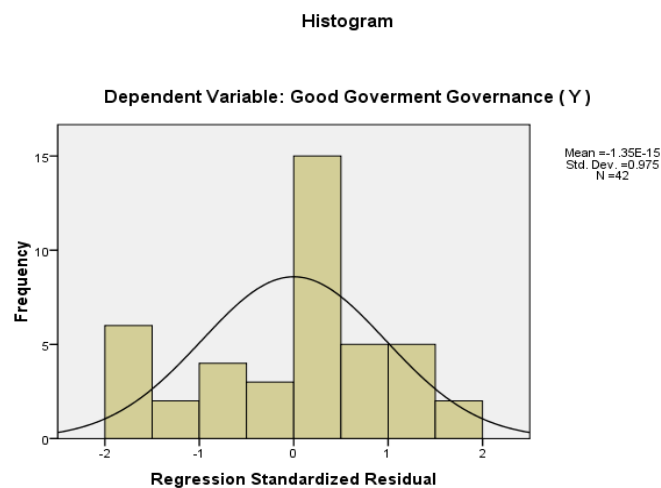
Tabel 4.14 Hasil Pengujian *Kolmogrov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.22656330
Most Extreme Differences	Absolute	.167
	Positive	.095
	Negative	-.167
Kolmogorov-Smirnov Z		1.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat angka *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,192 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.



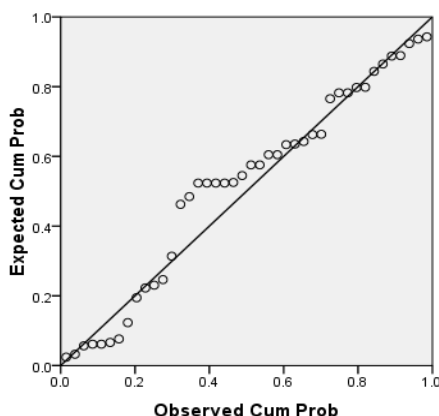
Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.2 Histogram

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat hasil pengolahan data uji normalitas diketahui bahwa data berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis berbentuk lonceng yang berkesinambungan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Good Government Governance (Y)



Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.3 Normal P.P Plot

Berdasarkan gambar diatas, untuk hasil pengujian normalitas dengan menggunakan gambar Normal P.P Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada disekitar garis diagonal sehingga data telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau VIF < 10. Maka disimpulkan ini terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dari hasil

kuisisioner yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.105	5.791		-.882	.383		
	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	.350	.165	.255	2.117	.041	.906	1.103
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	.827	.173	.576	4.787	.000	.906	1.103

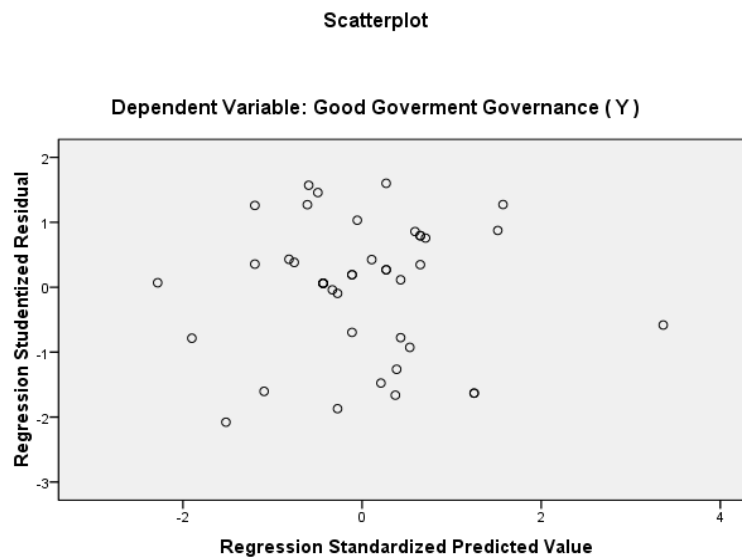
a. Dependent Variable: *Good Government Governance* (Y)

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah sistem informasi akuntansi $1,103 < 10$, sistem pengendalian intern $1,103 < 10$, dan nilai *tolerance* sistem informasi akuntansi $0,906 > 0,10$, sistem pengendalian intern $0,906 > 0,10$, sehingga terlepas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedasitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians residual* dari suatu pengamatan. Dikatakan berdistribusi normal apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot*. Hasil pengujian heterokedasitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.4 Uji Heterokedasitas

Berdasarkan gambar 4.4 diatas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau tren garis tertentu. Gambar diatas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada disekitar titik 0. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heterokedasitas, dengan perkataan lain variabel yang diuji dalam penelitian ini bersifat homokedasitas.

6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pada regresi linier berganda variabel independen (variabel X) yang diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel dependen (variabel Y), jumlahnya lebih dari satu. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah system informasi akuntansi (X1) dan system pengendalian intern (X2), sedangkan variabel dependen

adalah *Good Government Governance* (Y). Rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.105	5.791		-.882	.383		
	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	.350	.165	.255	2.117	.041	.906	1.103
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	.827	.173	.576	4.787	.000	.906	1.103

a. Dependent Variable: *Good Government Governance* (Y)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 5.105 + 0,350 + 0,827 + e$$

Persamaan tersebut bermakna:

- Jika segala sesuatu pada variabel bebas dianggap nol maka nilai *Good Government Governance* (Y) adalah sebesar 5.105
- Jika terjadi peningkatan Sistem Informasi Akuntansi sebesar 1, maka nilai *Good Government Governance* (Y) akan meningkat sebesar 0,350.
- Jika terjadi peningkatan Sistem Pengendalian Intern sebesar 1, maka nilai *Good Government Governanve* (Y) akan meningkat sebesar 0,827.

7. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.698 ^a	.487	.461	2.283	1.733

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X2), Sistem Informasi Akuntansi (X1)

b. Dependent Variable: Good Government Governance (Y)

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,461 yang disebut koefisien determinasi berarti 46,1% *Good Government Governance* dapat diperoleh dan dijelaskan oleh system pengendalian intern dan system informasi akuntansi. Sedangkan sisanya $100\% - 46,1\% = 53,9$ dijelaskan oleh factor lain .

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (uui t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.105	5.791		-.882	.383
Sistem Informasi Akuntansi (X1)	.350	.165	.255	2.117	.041
Sistem Pengendalian Intern (X2)	.827	.173	.576	4.787	.000

a. Dependent Variable: *Good Government Governance* (Y)

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa :

1) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap *Good Government Governance*

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan

H_a diterima dan H_o ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$

H_a ditolak dan H_o diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$

t_{hitung} sebesar $2.117 > t_{tabel}$ 1.682 dan dengan signifikan $0,041 < 0,05$, maka

H_a diterima dan H_o ditolak, yang menyatakan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap *good government governance*.

2) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Government Governance*

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan

H_a diterima dan H_o ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$

H_a ditolak dan H_o diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$

t_{hitung} sebesar $4.787 > t_{tabel}$ 1.682 dan dengan signifikan $0,000 < 0,05$, maka

H_a diterima dan H_o ditolak, yang menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap *Good Government Governance*.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji serempak) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara serempak. Cara yang digunakan dengan melihat *level of significant* (0,05). Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka *Ho* ditolak dan *Ha* diterima.

Tabel 4.19 Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	193.215	2	96.608	18.536	.000 ^a
	Residual	203.261	39	5.212		
	Total	396.476	41			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X2), Sistem Informasi Akuntansi (X1)

b. Dependent Variable: Good Government Governance (Y)

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 18.536 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,23 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$, signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan dalam penelitian ini bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap *Good Government Governance* .

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap *Good Government Governance* Pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat

Berdasarkan penelitian ini, maka didapat hasil penelitian yaitu Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat. Menurut Selamat (2011), salah satu factor yang dapat mewujudkan *Good Government Governance* ialah diperlukan adanya penerapan yang lebih maksimal terhadap system informasi akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system informasi akuntansi dapat dijadikan factor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yusniar (2016) dengan judul “Pengaruh penerapan system akuntansi dan pengendalian system pengendalian intern terhadap *good governance* studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa system informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Good Government Governance*.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Government Governance* Pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat

Berdasarkan penelitian ini, maka didapat hasil penelitian yaitu Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat. Menurut Mardjiono

(2009) factor yang juga berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* adalah system pengendalian intern pemerintah terutama dalam hal pengawasan intern. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga tidak terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal control dalam sebuah organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system pengendalian intern pemerintah sangat berguna agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yusniar (2016) dengan judul “Pengaruh penerapan system akuntansi dan pengendalian system pengendalian intern terhadap *good governance* studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa system informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Good Government Governance*.

3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Government Governance* Pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat

Berdasarkan penelitian ini, maka didapat hasil penelitian yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap *Good Government Governance* pada Seluruh Dinas Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yusniar (2016) dengan judul “Pengaruh penerapan system akuntansi dan pengendalian system pengendalian intern terhadap *good governance* studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Hasil penelitian

sebelumnya menunjukkan bahwa system informasi akuntansi dan system pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap *Good Government Governance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh system informasi akuntansi dan system pengendalian intern terhadap *good government governance* pada seluruh Dinas di Kabupaten Langkat. Penelitian ini berjumlah 42 responden. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Informasi Akuntansi terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat .
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat .
3. Terdapat pengaruh secara Simultan antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap *Good Government Governance* pada seluruh Dinas Kabupaten Langkat .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya Dinas-Dinas di Kabupaten Langkat, diharapkan untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pelaksanaan system informasi akuntansi berupa peningkatan sumber daya manusia yang lebih paham dengan system informasi akuntansi serta peralatan yang memadai untuk menjalankan system tersebut dan lebih meningkatkan system pengendalian intern terutama dalam hal pengawasan agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya :
 - a. Menambah variabel lain yang belum dimasukkan di penelitian ini terhadap *Good Government Governance*.
 - b. Menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung atau memperoleh data yang berkualitas.
 - c. Memperluas daerah observasi, atau menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian lebih akurat .

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Azhar, Susanto. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*, Cetakan Pertama. Lingga Jaya. Bandung.
- Bodnar, G.H dan Hopwood, W.S. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DDPKA) Provinsi Yogyakarta, (2012). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kaitannya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public*. Yogyakarta.
- Dwilita, H. (2019). PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN INDONESIA STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Febrina, A. (2019). MOTIF ORANG TUA MENGUNGGAH FOTO ANAK DI INSTAGRAM (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiwinoto. (2017). *Good Government Governance*. Diperoleh 4 desember, <https://hardiwinoto.com/good-government-governance>.
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.

- Setiawan, A., Hasibuan, H. A., Siahaan, A. P. U., Indrawan, M. I., Rusiadi, I. F., Wakhyuni, E., ... & Rahayu, S. (2018). Dimensions of Cultural Intelligence and Technology Skills on Employee Performance. *Int. J. Civ. Eng. Technology*, 9(10), 50-60.
- Setiawan, A. (2018). PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 191-203.
- Setiawan, A. (2019). ANALISIS PENGUKURAN NILAI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESIN PRESS BATU BATA (Studi Kasus pada Unit Usaha Mesin Press Muhammad Kuwat) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-3. Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi (2016). *Auditing*. Buku 1, Edisi 6, Jakarta : Salemba Empat.
- Nasution, N. A. (2019). TATA CARA PELAPORAN PAJAK TERHUTANG SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. BINA REKAYASA. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 37-53.
- Lahu, Misya, Kurnia. (2011). *Pengaruh Penerapan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT.Kimia Farma*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017*.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Ritonga, M. (2018). FAKTOR MANAJEMEN BIAYA DAN MANAJEMEN PEMASARAN TERHADAP PENDAPATAN MELALUI INTENSITAS PRODUKSI PADA UKM INDUSTRI RUMAHAN DI KOTA BINJAI. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

Silviana. (2013). *Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: UNS.

Sukmaningrum, Tantriani, (2012). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada*

Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Supraja, G. (2019). PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.

Waruwu, A. A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *JUMANT*, 10(2), 1-14.

Yusniar, Darwanis, Syukry Abdullah. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)*. Aceh : Universitas Syiah Kuala.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

https://medan.bpk.go.id/?page_id

<https://www.langkatkab.go.id>

<https://news.metro24jam.com/read/2016/11/24/2573>